
DIALOG KARYA SEBAGAI STRATEGI KOMUNIKASI PENYELESAIAN KONFLIK BERMOTIF AGAMA TERHADAP MASYARAKAT ETNIS ROHINGNYA DI MYANMAR

Syafruddin Pohan¹, Robertus Kristianto Naku²

¹Universitas Sumatera Utara Medan, Indonesia

sibotanglidia36@gmail.com

² Universitas Sumatera Utara Medan, Indonesia

Diserahkan tanggal 01 Maret 2023 | Diterima 16 Maret 2023 | Diterbitkan tanggal 31 Maret 2023

Abstract:

Phenomenal problems that have hit Myanmar have recently been in the spotlight of the mass media. The existence of a group of Buddhist extremists who commit violence against adherents of other religions gives its own color. Discrimination based on ethnic conflict between the majority and minorities is not only identified by religious elements, but also accompanied by political, social, cultural and economic elements. Government instability also supports the spread of this increasingly prolonged conflict. In fact, the existence and teachings of the Buddha on nibbana are also questionable. Nibbana is the ultimate reality, which is said to be a situation or condition where humans experience peace and emptiness when faced with the reality of violence that causes suffering, especially for Rohingya Muslims. The theological approach that can be offered in resolving such conflicts is comparative theology which boils down to dialogue of works. However, before reaching this stage, a theological disposition is needed by returning to their respective originality, strengthening their identity roots first and then establishing dialogue and cooperation with those who differ in comfort, openness, and harmony.

Keywords: *Ethnic Conflict, Spiritual Ethnicity, Nibbana, Dialogue of Work, Originality, Identity, Theology*

Abstrak :

Masalah fenomenal yang melanda Myanmar akhir-akhir ini menjadi sorotan media massa. Adanya kelompok ekstremis Budha yang melakukan kekerasan terhadap penganut agama lain memberikan warna tersendiri. Diskriminasi berdasarkan konflik etnis antara mayoritas dan minoritas tidak hanya diidentifikasi oleh unsur agama, tetapi juga disertai oleh unsur politik, sosial, budaya dan ekonomi. Instabilitas pemerintahan juga mendukung meluasnya konflik yang semakin berkepanjangan ini. Nyatanya, keberadaan dan ajaran Sang Buddha tentang nibbana juga patut dipertanyakan. Nibbana adalah realitas pamungkas, yang dikatakan sebagai situasi atau kondisi di mana manusia mengalami kedamaian dan kehampaan ketika berhadapan dengan realitas kekerasan yang menimbulkan penderitaan, khususnya bagi Muslim Rohingya. Pendekatan teologis yang dapat ditawarkan dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah teologi komparatif yang bermuara pada dialog karya. Namun, sebelum sampai pada tahap ini, diperlukan disposisi teologis dengan kembali ke orisinalitas masing-masing, memperkuat akar identitasnya terlebih dahulu kemudian menjalin dialog dan kerja sama dengan mereka yang berbeda kenyamanan, keterbukaan, dan keharmonisan.

Kata Kunci: *Konflik Etnis, Etnis Rohingya, Nibbana, Dialog Karya, Orisinalitas, Identitas, Teologis*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Persatuan umat manusia dalam keberagaman dewasa ini kembali dipertanyakan. Kekerasan merajalela, bahkan dengan mudah orang-orang membunuh sesamanya. Nilai-nilai kemanusiaan telah luntur oleh karena kepentingan-kepentingan pribadi, maupun kelompok tertentu. Manusia telah menjadi makhluk yang egois dan tidak lagi mempedulikan orang lain di sekitarnya. Isu-isu seputar perbedaan latar belakang suku, agama, ras, dan etnik kembali terangkat dan menjadi permasalahan di berbagai belahan dunia. Jika diperhatikan, aspek kehidupan manusia yang paling sensitif dan mudah untuk memicu pertentangan adalah soal agama. Orang-orang radikal dan fanatik akan dengan mudah melakukan kekerasan atas nama Tuhannya masing-masing.

Menurut Mike Featherstone, modernisasi ditandai oleh pemutusan hubungan secara tegas terhadap nilai-nilai tradisional, mulai berkembangnya sistem kapitalisme progresif, rasionalisasi administratif, serta diferensiasi sosial dan budaya (Mike Featherstone, 1998). Dalam hal ini, sistem berpikir juga ikut melahirkan upaya pemutusan rantai keterhubungan manusia dengan nilai-nilai tradisional. Kekayaan dimensi tradisional – dalam konteks ini – juga menyangkut relasi dengan alam ciptaan. Dalam setiap tradisi atau budaya tertentu, alam menempati strata sosial paling atas. Kekayaan dimensi tradisional juga menyangkut relasi horizontal antara sesama manusia. Relasi horizontal merupakan bentuk komunikasi atau relasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang notabene menempati posisi yang sama (Amin, 2022).

Di dunia ini, ada banyak kelompok etnis mayoritas dan kelompok etnis minoritas. Perhitungan ini didasarkan pada populasi suku, agama, ras, dan kategori-kategori lainnya. Dalam hal ini pun definisi tentang mayoritas dan minoritas pun diframe oleh kelompok tertentu. Definisi minoritas yang sering digunakan di berbagai negara adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Selain itu, etnis minoritas, dari kalkulasi populasi atau jumlah penduduk lebih kecil dibandingkan dengan etnis mayoritas (Janu Muridyatmoko, 2007).

Salah satu kasus konflik agama yang terjadi adalah kasus penyerangan terhadap orang-orang Muslim di Myanmar. Ironisnya tokoh di balik penyerangan ini adalah seorang biksu Buddhis. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai kasus pembakaran sebuah Masjid di Desa Hpakant, Negara Bagian Kachin, Myanmar (Kompas, 1/7/2016). Dalam kajian ini, penulis akan melihat kasus ini dan menganalisa apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa kasus ini terjadi. Tulisan ini tidak hanya membahas mengenai analisa sosial saja, tapi kita juga akan mencoba membahasnya sampai pada tataran teologis. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan akan menjadi semakin komprehensif dan mendalam. Pada akhirnya dalam tulisan ini, penulis akan memberikan sebuah kesimpulan dan rekomendasi yang bisa dibuat bersama demi kepentingan bersama.

Konflik Etnis Rohingnya di Myanmar

Problem seputar konflik etnis Rohingnya dan penduduk Myanmar adalah bagian dari strategi. Banyak ahli mengklaim, dasar utama konflik adalah persoalan agama. Akan tetapi, hemat saya, selain agama, unsur lain yang turut mem-back up berbagai kerusuhan di Myanmar adalah faktor politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Unsur-unsur ini disinyalir menjadi bayang-bayang di belakang nama agama. Myanmar hanyalah gunung es dari potret kekerasan yang mengatanasnamakan agama (I Marsana Windhu, 1992).

Nama Myanmar, pada awalnya dikenal dengan sebutan Burma – dominasi etnis. Dalam catatan sejarah, etnis lainnya yang ikut berkembang adalah etnis Karen, Shan, Rakhine, Mon, Chin, Kachin, dan kelompok etnis minor lainnya (Agil Iqbal Cahaya, 2015). Sejak kudeta Jenderal Ne Win tahun 1962, Burma (Myanmar) jatuh dalam kenistaan dan kutukan. Militer menguasai Myanmar melalui kudeta pada 2 Maret 1962 dan terus menancapkan kekuasaannya dengan menindas warganya sendiri. Menurut Mary P. Callahan dalam tulisannya “Language Policy in

Modern Burma” (Mary P Callahan, 2003), sejarah politik Myanmar memang pernah mencatat bahwa kemenangan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi/National League for Democracy (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi pada pemilihan umum 1990 tidak diakui dan kemudian Junta Militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar serta menahan Suu Kyi sebagai pimpinan NLD.

Akan tetapi, hal positif tiba-tiba muncul pada pemerintahan Presiden Thein Sein (30 Maret 2011- 30 Maret 2016). Banyak tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi, dibebaskan. Dengan dibebaskannya para tahanan politik yang berusaha memboikot pemilu pada tahun 1990, politik angin segar pun mulai dirasakan. Perubahan ini, dimanfaatkan oleh para pejuang demokrasi sebagai moment pembebasan. Akhirnya pada tahun 2016, partai usungan Suu Kyi yakni NLD, berhasil menduduki kursi pemerintahan (Rena Pederson, 2016). Akan tetapi, pertanyaannya adalah benarkah Junta Militer melepas ambisinya untuk menguasai Myanmar?

Diskriminasi yang dilarbelakangi etnis dan konflik antara mayoritas dan minoritas tetap terjadi. Harapan Suu Kyi menjadi sebuah tembang. Berbagai konflik yang terjadi usai NLD berkuasa, tidak menuai jalan keluar. Suu Kyi sebagai ujung harapan dari mereka yang terpinggirkan tak kunjung bersuara. Ironisnya, persoalan Rohingnya malah diminati oleh komunitas di luar Myanmar (The Jakarta Post, 26 November 2016). Hal ini tentunya menjadi ruang bagi Junta Militer untuk melakukan aksi penggulingan rezim Suu Kyi. Strategi politik Junta Militer untuk menggulingkan pemerintahan demokrasi memang sudah dirasakan, mengingat konstitusi tertentu masih bersifat kaku (Rena Pederson, 2016). Strategi pelanggaran kekuasaan tentunya memanfaatkan konflik antar-etnis. Junta Militer tidak hadir sebagai mediator-dialogis dalam menyelesaikan persoalan. Akan tetapi, Junta Militer hadir dengan strategi politik klasik, yakni strategi adu domba. Junta Militer memanfaatkan konflik antar-etnis sebagai celah untuk berkuasa.

Selain unsur politis, hal lain yang memicu terjadinya konflik adalah pencaplokan Hak Asasi Manusia (HAM). Warga minoritas tidak mendapat hak yang sama sebagai warga negara. Perbedaan ini justru melahirkan aksi pemberontakan dari penduduk minoritas. Sedangkan dalam skala horisontal, ada kecemburuan sosial yang terjadi di antara warga – terutama antara penduduk pendatang dan penduduk asli. Kehadiran pendatang mengancam kenyamanan dan ketenteraman hidup penduduk asli. Kecemburuan sosial ini bisa berupa, ketakutan akan kehilangan hak atas lahan oleh karena jumlah pengungsi/pendatang yang semakin banyak, serta berdampak pada persaingan ekonomi dan budaya. Selain itu, lemahnya kontrol pemerintah atas ketidakstabilan politik dan keamanan nasional membuat konflik semakin berkepanjangan. Upaya dialog sebagai jembatan, tidak lagi didengar. Strategi yang digunakan untuk penyelesaian konflik justru malah hadir dengan wujud kekerasan, senjata, dan ketidakpedulian.

Michael E Brown dalam tulisannya “Causes and Implications of Ethnic Conflict” (1997) menunjukkan bahwa ada tiga penyebab utama konflik etnis, yakni level sistemik, level domestik dan level persepsi (Michael E Brown, 1997: 92-99).

1. Kendali pemerintah/negara atas berbagai ketimpangan sosial yang bergumul (sistem)

Penyebab utama terjadinya konflik etnis adalah lemahnya otoritas negara – nasional maupun internasional – dalam mencegah etnis yang tengah berkonflik. Konflik yang menyulut hingga ke pembasmian etnis (genosida), sejatinya dipengaruhi oleh sistem penyelesaian yang bersifat memihak. Pemerintah hadir di tengah-tengah mereka yang berkonflik, tidak dengan cara yang semestinya – misalkan merangkul kedua belah pihak yang bertikai – tetapi justru menggunakan cara-cara yang frontal (Michael E Brown, 1997). Pemerintah hadir dengan memobilisasi tentara dan peralatan militer. Cara intervensi pemerintah sebagai penengah justru menimbulkan persoalan baru, yakni bellum omnium contra omnes (perang semua melawan semua).

2. Kemampuan pemerintah memenuhi tuntutan rakyat - hak dasar (domestik)

Menurut Michael E Brown (Michael E Brown, 1997), level domestik pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi tuntutan rakyat dan pengaruh proses

demokratisasi. Setiap orang selalu mengharapkan pemerintahannya menyediakan keamanan dan stabilitas ekonomi. Dalam masyarakat transisi seperti Myanmar, yakni dari pemerintah otoriter menuju demokrasi, pemerintah yang baru kadang menjumpai kendala untuk mewujudkan kestabilan ekonomi dan politik. Fenomena penurunan stamina ekonomi dan politik ini, pada akhirnya cenderung mengkambinghitamkan kaum minoritas (Michael E Brown, 1997).

3. Kecelakaan sejarah yang berakibat pada membenaran rumor – hiperealitas sejarah (persepsi)

Pemahaman sejarah antara dua kelompok etnis yang berbeda mengantar masyarakat Myanmar jatuh pada pintu konflik. Sejarah di sini tidak dikonstruksi melalui fakta-fakta historis, akan tetapi justru melalui rumor dan gosip yang diwariskan turun-temurun (Michael E Brown, 1997). Cerita-cerita tersebut kemudian menjadi adat-istiadat. Hiperrealitas fakta semacam ini perlahan-lahan semakin mengantar orang pada kecurigaan dan iri hati terhadap sesama. Pada level persepsi ini, dengan sendirinya yang lain (Iyan) dicap buruk atau diklaim sebagai pembawa malapetaka, diberi label minoritas, dicap berbahaya dan pantas disingkirkan-dimusnahkan (Michael E Brown, 1997).

Perebutan lahan kekuasaan akhirnya tidak jarang terjadi. Pada 1 Juli 2013, Time Magazine menempatkan wajah Bhikku Ashin Wirathu, pemimpin umat Buddha aliran Theravada pada sampul majalah dengan judul “The Face of Buddhist Terror.” Pada tahun 2013, Ashin Wirathu memobilisir umat Buddha untuk menyingkirkan Muslim. Kampanye anti-Muslim ini biasanya dikenal dengan istilah Gerakan 969. Logo gerakan ini memiliki kode-kode tertentu (M. Jerryson, 2010). Logo itu berbentuk lingkaran cakra dengan empat singa Asia di bagian tengahnya menggambarkan keturunan Budha Ashoka. Sticker berlogo 969 ini kerap dibagikan gratis saat ceramah-ceramah. Sticker ini juga ditempel di berbagai tempat dan benda-benda seperti pintu toko, pintu rumah, taksi (Kristina Kironka, 2016: 18). Pernyataan Wirathu yang paling kontroversial adalah “Anda bisa berikan kebaikan dan rasa kasih, tetapi Anda tidak bisa tidur di samping anjing gila (Muslim),” kata Wirathu seperti dikutip The New York Times, 21 Juni 2013. Pernyataan ini membuatnya dijebloskan ke penjara. Strategi Wirathu dilihat sebagai bentuk politik pencitraan. Ashin Wirathu disebut-sebut sebagai tokoh yang berpengaruh dan sering mendapat stimulus untuk maju menduduki kursi politik di Myanmar.

Dr. Maung Zarni menyebut gerakan 969 dengan nama Neo-Nazi karena berusaha membersihkan Islam dari Myanmar (Sandy Raharjo, 2015). Selain itu, kelompok Muslim sendiri juga memiliki logo angka, yakni 786 sebagai representasi dari Islam yang terberkati. Simbol ini dilihat oleh orang Buddha sebagai simbol rencana Muslim untuk menguasai dunia. Perbedaan kulit juga menjadi diskriminasi budaya atas etnis Rohingnya. Akan tetapi, menurut penelitian Kironka, masyarakat Myanmar sendiri tidak terlalu tertarik dengan topik Rohingnya. Topik ini lebih banyak dikonsumsi dalam dunia politik sebagai strategi kampanye (Kristina Kironka, 2016).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sugiyono mengungkapkan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2021). Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami arti atau mencari makna dari peristiwa dalam kaitannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu (Moleong, 2005). Penelitian deskriptif kualitatif memberikan penjelasan terkait Dialog Karya Sebagai Strategi Komunikasi Penyelesaian Konflik Bermotif Agama Terhadap Masyarakat Etnis Rohingnya Di Myanmar. Dalam hal ini, penulis menggunakan referensi buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya sebagai bahan pendalaman penelitian. Selain metode deskriptif kualitatif, penulis juga menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian adalah kajian mengenai kasus pembantaian Etnis Rohingnya di Myanmar.

PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap umat Muslim di Myanmar mulai muncul sejak transisi pemerintahan di Myanmar, yakni dari otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis. Situasi yang terjadi di Myanmar memang cukup ironis. Ketika suasana pemerintahan bergerak ke arah demokrasi, akan tetapi bersamaan dengan itu, justru timbul kekerasan terhadap kaum minoritas, terutama terhadap penganut agama Islam (www.reuters.com/article/us-myanmar-violence). Terakhir kali pada 1 Juli 2016, sekelompok biksu menyerang masjid dan membakarnya. Peristiwa ini terjadi di Desa Hpakant, Negara Bagian Kachin, Myanmar. Hal ini menjadi suatu keprihatinan yang mendalam, bukan hanya karena pelaku dari perusakan dan pembakaran itu adalah para penganut ajaran Buddha yang menghayati ajaran cinta kasih dan kedamaian, akan tetapi lebih dari itu adalah kekerasan terhadap minoritas Muslim yang tak kunjung berakhir bahkan sampai saat ini.

Ketika ditelisik lebih jauh, persoalan kekerasan terhadap kaum minoritas muslim di Myanmar sejatinya dilatarbelakangi oleh situasi pemerintahan pada era Junta Militer selama kurang lebih 49 tahun dimana pemerintahan Junta Militer itu sendiri baru berakhir pada 2011. Ashin Wirathu seorang Buddhis pemimpin gerakan anti-Muslim mengatakan bahwa kehadiran orang-orang muslim di Myanmar akan memudarkan identitas Buddha di sana (<http://www.reuters.com/article/us-myanmar>). Tidak heran bila kekerasan, bukan hanya perusakan, tetapi juga pembunuhan, semuanya terjadi demi membersihkan Myanmar dari agama-agama selain Buddha.

Bila dilihat dari sisi Teologis, persoalan kekerasan ini menyangkut bagaimana Agama Buddha di Myanmar hidup dan berkembang. Myanmar adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha Theravada (M. J Walton, 2012). Pencapaian nirwana (surga-keabadian) dari kelompok Buddha Theravada diusahakan secara personal dengan mengusahakan kesadaran dan keterarahan pikiran. Melihat unsur ini, dapat diambil sedikit kesimpulan bahwa kelompok Buddha Theravada tidak memiliki perhatian terhadap persoalan sosial di sekitarnya, karena yang diutamakan adalah bagaimana nirwana dapat hadir bagi individu secara personal. Dengan kata lain, para penganut Buddha di Myanmar adalah golongan eksklusif (tertutup). Apa yang dikatakan oleh para penganut Buddha bahwa mereka menginginkan semua orang yang tinggal di Myanmar memeluk agama Buddha, menjadi bukti bahwa mereka sendiri tidak menginginkan adanya golongan lain selain Buddha menetap di Myanmar. Penulis sedikit menelaah persoalan ini. Mungkin pertanyaan yang akan diajukan oleh penganut Buddha kepada orang-orang non-Buddha di Myanmar akan mengatakan “menjadi penganut Buddha atau mati.”

Mengacu pada pernyataan Ashin Wirathu penulis mencoba memberikan penilaian terhadap posisi teologis Ashin Wirathu atau kelompok Buddha di Myanmar. Penulis berpendapat bahwa Ashin Wirathu dan atau kelompok Buddha di Myanmar cenderung bersikap eksklusif terhadap kelompok agama lain. Eksklusivitas itu tampak pada pola penilaian agama Buddha terhadap agama lain.

Agama Buddha memang tidak pernah berbicara mengenai konsep Allah. Akan tetapi, dalam agama Buddha ada konsep mengenai Realitas Tertinggi, yakni nirwana/nibbana. Sebagaimana yang dipahami bahwa nirwana ini sesungguhnya tidak menunjuk pada suatu tempat, tetapi nirwana menunjuk pada situasi atau keadaan; saat manusia mengalami ‘kedamaian dan kekosongan’. Oleh karena itu, suatu pertanyaan mendasar terhadap konfrontasi konsep Realitas Tertinggi dan tindakan kekerasan kaum ekstrimis Buddha di Myanmar, yakni apakah dengan menindas dan melakukan kekerasan terhadap penganut agama lain, Realitas Tertinggi ini dapat tercapai? Apakah konflik akan membawa manusia pada situasi ‘kedamaian dan kekosongan’?

Realitas Tertinggi

Nibbana merupakan realitas tertinggi dalam agama Buddha. Akan tetapi, nibbana tidak mempunyai definisi yang jelas karena berbeda dari realitas manusia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa nibbana yang dipahami dalam agama Buddha tidaklah pertama-tama mengacu

pada tempat tertentu, tetapi justru mengacu pada suatu kondisi atau situasi tertentu. Situasi yang dimaksudkan yakni sunyata.

Kita perlu memahami bahwa sunyata bukanlah suatu kekosongan belaka atau seolah-olah tidak ada apa-apa, melainkan kehampaan atau kekosongan dari segala ikatan sebab-akibat segala kemelekatan duniawi. Sunyata ini sangat menekankan dimensi afektif atau perasaan. Segala perasaan tersebut diyakini tidak berasal dari hubungan dengan wujud supranatural. Keadaan seperti itu alamiah bagi kemanusiaan: bisa dicapai oleh setiap orang yang hidup dengan cara yang benar dan mempelajari teknik yoga (Karen Armstrong, 2015: 68). Keyakinan inilah yang menyebabkan eksistensi dewa-dewa dalam agama Buddha tidak terlalu diutamakan. Meskipun agama Buddha meyakini bahwa dewa-dewa turut berperan dalam kehidupan, akan tetapi mereka tidaklah mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Mereka bahkan masih terikat dengan realitas penderitaan, perubahan, siklus kelahiran kembali dan kefanaan. Dalam menjelaskan tentang nibbana, kaum Buddhis sering menggunakan penggambaran teistik:

Kami diajarkan bahwa nibbana itu permanen, stabil, abadi, diam, tak luput oleh usia, tak pernah mati, tidak dilahirkan, dan tidak diciptakan, bahwa ia adalah kekuatan, anugerah, dan kebahagiaan, perlindungan yang aman, tempat berteduh, dan tempat dengan rasa aman yang tak terpunahkan; bahwa ia adalah Kebenaran sejati dan Realitas tertinggi; bahwa ia adalah kebaikan, tujuan puncak, dan satu-satunya dambaan kehidupan kita, kedamaian yang abadi, terselubung, dan tak terpahami (Karen Armstrong, 2015).

Dalam usaha mencapai realitas tertinggi (nibbana), orang tidak diharapkan mencarinya secara proaktif. Akan tetapi, usaha tersebut dilakukan dengan menghilangkan keegoisan dan 'mematikan' keinginan. Bagi Buddha Theravada, nibbana ini dicapai dengan usaha sendiri, tanpa campur tangan orang lain. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melihat adanya suatu kontradiksi antara tindakan para ekstremis Buddha di Myanmar dengan pemahaman mereka tentang Realitas Tertinggi. Nibbana tidak akan mungkin dicapai melalui tindakan kekerasan. Meskipun agama Buddha dipahami sebagai agama pelenyapan, akan tetapi pelenyapan ini dimaknai sebagai penyingkiran dari segala bentuk pemikiran kotor, keserakahan, kebencian, dan khayalan yang buruk.

Penderitaan merupakan situasi yang perlu disingkirkan. Ada sumpah Boddhisatva yang dikenal sebagai sumpah universal. Pertama, berjanji menyelamatkan seluruh umat manusia dari penderitaan. Ini berarti agama membuka jiwa Buddha umat manusia, serta misinya di bidang sosial adalah memberikan kontribusi untuk kemakmuran dan perdamaian umat manusia di tempat di mana ia berada. Kedua, menghancurkan sepenuhnya nafsu duniawi. Maksudnya adalah bersumpah mengatasi berbagai bentuk pikiran jahat yang ada dalam diri, dan diubah menjadi kebaikan untuk menyelamatkan orang-orang (Tjahyono Wijaya, 2007). Dengan demikian, agama Buddha sejak semula sesungguhnya sudah mempunyai kewajiban untuk melenyapkan penderitaan (dukkha). Akan tetapi, kewajiban ini perlu dipertanyakan lagi mengingat tindakan yang dilakukan oleh para ekstremis Buddha dimana tindakan mereka bukannya melenyapkan penderitaan, tetapi justru menghadirkan penderitaan, yakni dengan memusnahkan kaum Muslim Rohingya.

Strategi Dialog Teologi Komparatif

Perspektif teologi yang ditawarkan oleh penulis sebagai jalan yang dapat mendamaikan pertikaian antara penganut Buddha dan Islam di Myanmar adalah teologi komparatif. Titik tolak ini berangkat dari perspektif teologi komparatif yang digagas oleh teolog-teolog Katolik. Para teolog komparatif berusaha memulai dengan langkah-langkah sederhana, misalnya membandingkan teks khusus antara kedua agama, kepercayaan, teolog terkenal, konteks terbatas, atau beberapa periode historis. Para teolog komparatif berusaha meneliti atau mencium masalah-masalah khusus di dalam ajaran-ajaran masing-masing agama, sebagai contoh Kristiani dan

Hindu, yang sama atau malah bertentangan – kemudian menggantinya lebih dalam (konteks ini nanti diterapkan antara Islam dan Buddha). Dengan membatasi diri semacam ini, pemahaman komprehensif bisa lebih mendalam. Dengan membatasi hanya pada masalah-masalah konkret dalam pengakuan iman, peraturan agama, atau upacara agama, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menemukan wawasan yang lebih luas atau kekuatan dari kedua agama ini. Dengan membatasi masalah dalam dialog, maka dampak pada spiritualitas mereka akan terasa.

Clooney menggambarkan pengalaman seorang teolog komparatif sebagai proses melangkah dengan susah payah dan sulit, tetapi menarik dan mengasyikkan ke dalam dunia agama lain, menjelajahi dunia agama itu, menghayati berbagai simbol dan ceritanya, dan kemudian kembali ke dalam agama sendiri dan menunggu apa yang terjadi. Fredericks mengatakan: “Seorang teolog komparatif adalah seorang yang sadar akan krisis pemahaman yang ditimbulkan oleh adanya gangguan akan kehadiran Yang Lain. Hal ini berarti bahwa teologi komparatif itu bekerja dalam ketegangan yang terjadi karena 1) kerapuhan terhadap kuasa transformatif dari Yang Lain, dan 2) kesetiaan terhadap ajaran Kristiani.”

Kerapuhan dan kesetiaan - itulah tegangan anugerah kehidupan dan hasil kerja dalam teologi komparatif, baik bahagia maupun sedih (Paul Knitter, 2014). Bertolak dari teologi komparatif, maka penulis akan membandingkan ajaran dalam agama Islam dan Buddha yang kiranya ada kesamaan nilai yang terkandung dan merupakan perjuangan baik bagi para penganut agama Islam dan Buddha selama hidup di dunia ini. Dari perbandingan ini kemudian hal-hal yang sama kiranya dapat menjadi jembatan penyambung keterpisahan akibat konflik itu. Untuk itu, penulis akan membandingkan antara gagasan persaudaraan dalam Islam dan etika relasi sosial dalam Buddha. Etika agama Buddha tidak didasarkan pada ketaatan terhadap seperangkat perintah, melainkan lebih didasarkan pada pengertian benar terhadap bahaya-bahaya dari keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan; dan pada nilai-nilai yang terkandung dalam cinta kasih, kasih sayang, dan ketenangan hati (Paul Knitter, 2014).

Dengan demikian, perkataan “baik” dan “jahat” dalam agama Buddha tidak mengandung pengertian rasa malu dan rasa bersalah seperti di dunia Barat. Sesungguhnya, Sang Buddha sering menghindari kata-kata “baik” dan “jahat”, dan sebagai penggantinya memakai kata-kata “bermanfaat” dan “tidak bermanfaat” atau “menyenangkan” dan “tidak menyenangkan.” Dalam Buddhisme dapat ditemukan pandangan bagaimana membina relasi sosial yang baik. Teks mendasar yang penting dalam area ini adalah Sigalovada Sutta, yang digambarkan oleh Asoka sebagai Kitab Disiplin (Vinaya) bagi awam yang sejajar dengan biarawan dan biarawati. Dalam teks ini dikatakan bahwa dalam sebuah perjalanannya, Buddha berjumpa dengan Sigala (seorang suami muda yang sangat berbakti kepada orangtua) yang memuja keenam arah sesuai dengan pesan ayahnya sebelum meninggal (Peter Harvey, 1990). Dia menasihatkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk mengabdikan “keenam arah”: dengan sikap-sikap yang pantas mengarah kepada enam tipe orang, untuk menghasilkan keserasian dalam jaringan relasi yang berpusat pada seorang individu. Seseorang harus melayani orangtuanya di arah “bagian timur” (dimana matahari terbit), gurunya di bagian “selatan,” istrinya di bagian “barat”, temannya di bagian “utara”, hamba dan pekerja di bagian “bawah” dan biarawan dan brahma di bagian “atas”(Peter Harvey, 1990).

Enam contoh pelayanan kepada sesama adalah sebuah panduan yang tepat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana memperlakukan orang dengan baik sehingga kita pun akan diperlakukan dengan baik. Misalnya, seorang anak harus menjaga tradisi orangtuanya, memberikan sedekah atas nama orangtuanya ketika mereka meninggal. Maka orangtuanya akan mewariskan warisan mereka kepada anaknya. Atau lainnya adalah seorang murid harus penuh perhatian ketika gurunya mengajar maka gurunya akan mengajarnya dengan baik. Seorang suami harus melayani istrinya dengan hormat, sopan, dan setia, sehingga istrinya akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan menunjukkan keramahannya.

Seorang harus melayani temannya dengan murah hati dan kebaikan, temannya akan menjadi pelindungnya dari bahaya. Seorang majikan harus menugaskan pembantunya sesuai

dengan kekuatannya atau kemampuannya, maka pembantunya akan bekerja dengan baik. Seorang biarawan harus diperlakukan dengan baik, misalnya menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka biarawan akan mengajar mereka mengenai kebaikan yang belum pernah mereka dengar. Petunjuk-petunjuk ini pada intinya mau mengarahkan kita bahwa jika kita memperlakukan orang dengan baik, maka kebaikan pulalah yang akan kita terima.

Sedangkan dalam agama Islam, ajaran mengenai persaudaran terdapat dalam ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa, “Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S.49:13) (Muchsin Qara’ati, 1991).

Dari sini kemudian dikembangkan konsep al-ukhuwwah al-Basyariah (persaudaraan universal). Demikian, Islam mengakui dan menjunjung tinggi al-ukhuwwah al-Basyariah di samping al-ukhuwwah al-Islamiah (persatuan antar-sesama Muslim). Islam pun menyerukan pergaulan dan interaksi sosial universal ini dengan asas persamaan dan persaudaraan, untuk saling kenal secara harmonis antarsesama, tanpa melihat latar belakang agamanya. Maka ukhuwwah Islamiah secara khusus tidak pernah menghalangi muslimin untuk membangun dan memelihara ukhuwwah al-Basyariah secara umum (Suryan Jamrah, 2015).

Setelah membandingkan kutipan dari kitab suci masing-masing yang kiranya memiliki nuansa pesan yang sejajar dalam memandang dan berhubungan dengan orang lain, langkah selanjutnya adalah membangun dialog. Dalam kesempatan ini penulis memilih untuk membangun sebuah dialog karya. Fokus dari dialog karya adalah pelayanan kemanusiaan yang dimotori oleh kedua agama dengan landasan universalnya adalah hormat terhadap sesama (Y. B Mangunwijaya, 1999). Bagaimana kedua agama melihat permasalahan di bidang kemanusiaan sekarang yang kiranya butuh untuk segera ditangani, misalnya saja masalah membludaknya pengungsi dari Timur Tengah. Kemudian kedua agama bersinergi untuk membantu mengatasi permasalahan itu.

Islam dan Buddha adalah dua agama besar dunia. Mereka tentu saja memiliki ajaran-ajaran yang berbeda. Akan tetapi, keduanya memiliki tujuan agar penganutnya dan bahkan umat manusia hidup sejahtera baik lahir maupun batin. Sehingga, untuk mewujudkan tujuan ini kedua agama menekankan pentingnya perdamaian, karena tanpa perdamaian, masyarakat manusia bukan hanya sulit dalam menjalankan ajaran agama masing-masing, tetapi juga tidak memiliki kondisi yang kondusif untuk mengembangkan kehidupan dan peradaban. Perdamaian dapat diciptakan dengan membangun dunia yang lebih adil secara ekonomi, politik, teknologi dan lain sebagainya. Agama tentu juga memiliki peran penting dalam membangun dunia yang damai, penuh toleransi dan harmoni di antara para penganutnya.

Menyikapi situasi yang terjadi di Myanmar antara Buddha dan Islam, penulis menawarkan suatu rekomendasi sebagai alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang selama ini sudah terjadi. Rekomendasi yang ditawarkan berupa dialog karya. Melalui dialog karya ini diharapkan dapat terjalin kerja sama, bahkan nantinya menjadi suatu kerja sama yang intens dan mendalam di antara mereka. Akan tetapi, untuk dapat memulai hal ini para pemuka agama dan umat beragama harus bisa menyadari otentisitas ajaran agamanya. Dalam kasus ini, para pemeluk agama Buddha di Myanmar semestinya kembali menyadari ajaran agamanya yang sungguh, misalnya ajaran tentang welas asih dan pelenyapan dukkha.

Dengan sungguh menyadari ajaran ini, mereka dapat menentukan sikap dan tindakan yang tepat seturut ajaran agamanya dalam menyikapi pluralitas iman. Dari hal inilah diharapkan mereka mampu menyadari bahwa Muslim Rohingya bukanlah musuh dan ancaman, melainkan saudara. Sementara itu dari pihak Muslim Rohingya diharapkan untuk senantiasa menggemakan ajaran agamanya tentang persaudaraan. Meskipun mereka mendapatkan perlakuan tidak adil, mereka diharapkan tetap mampu menunjukkan arti persaudaraan kepada para ekstremis Buddha. Melalui hal inilah, tugas para fungsionaris pemuka agama dan umat beragama untuk mensosialisasikan

dan mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama yang otentik tentang welas asih, penyingkiran dukkha, persaudaraan, dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Inilah salah satu level teologis yang harus dicapai, sebab dengan demikian mereka sungguh mampu mengusahakan hidup seturut ajaran agamanya yang otentik.

Level teologis menjadi hal utama yang harus tercapai karena konflik terjadi oleh karena kesalahpahaman terhadap ajaran agama. Hal ini menyebabkan dissonance (ketidaseselarasan) antara ajaran agama Buddha yang otentik dan tindakan kaum Buddha di Myanmar. Dengan pencapaian pada level teologis ini, selanjutnya diharapkan mampu berdampak pada dimensi sosial dan politik. Artinya, berangkat dari pemahaman yang benar, terbuka ruang dan kesempatan yang sama untuk kaum Muslim terlibat dalam kegiatan sosial dan politik. Mereka diberi hak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, sehingga situasi ‘aman’ tercapai (ada jaminan, ada yang dapat menyampaikan aspirasi mereka dalam cakupan yang lebih luas). Pada akhirnya, dialog karya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Salah satu yang relevan untuk dilaksanakan ialah bantuan bagi para imigran, khususnya dari Timur Tengah. Mungkin banyak yang akan meragukan hal ini dapat terwujud, namun kelompok kami percaya bahwa ini sungguh bisa diwujudkan ketika level teologis tercapai. Alasannya, kaum Buddha tidak akan lagi memandang mereka sebagai ancaman.

SIMPULAN

Pluralitas iman memang menjadi fenomena dan realitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Konflik antara ekstremis Buddha di Myanmar dan kaum Muslim Rohingya hanyalah salah satu di antara banyaknya kasus konflik antarumat beragama. Dalam menyikapi fenomena pluralitas iman, kelompok mengusulkan ‘Opened-Integrity’ sebagai suatu posisi dalam Teologi Agama-agama. *Opened-Integrity* berarti setiap orang setia dan percaya dengan penuh kesungguhan dan menghidupi ajaran imanya, namun mereka juga tetap terbuka terhadap ajaran agama lain. Dalam hal ini, *opened-integrity* melengkapi kekurangan dari posisi eksklusif (memandang yang lain tidak selamat, sehingga tidak membuka kesempatan untuk berdialog), posisi pluralis (relativisme), dan inklusif (khususnya, istilah Kristus anonim Karl Rahner sebab yang lain belum tentu disebut demikian).

Opened-Integrity ini pun hendaknya dikembangkan lagi dengan teori 7 jiwa unggul sebagaimana yang dikemukakan oleh Y.B. Prasetyantha. Teori 7 jiwa unggul ini, antara lain:

1. Realistis, artinya menerima pluralitas iman sebagai realitas;
2. *Positive Thinking*, artinya melihat pluralitas iman bukan saja masalah tetapi juga sebagai berkat;
3. *Praksis A Posteriori*, artinya mengenal agama-agama lain tidak secara teoritis dan *a priori* melainkan dalam perjumpaan pribadi;
4. *Living with tension*, artinya hidup dengan ketegangan untuk selalu setia pada kebenaran iman sendiri, sekaligus terbuka terhadap kebenaran iman yang dihidupi oleh orang lain;
5. Persahabatan sejati, artinya menerima persamaan dan perbedaan dengan serius dan tulus;
6. *Beyond Tolence*, menjadikan perjumpaan pribadi sebagai suatu tindakan perlawanan terhadap kecenderungan untuk mengimunitasi diri dan suatu tindakan harapan untuk mencapai transformasi spiritual; dan
7. *Kenosis*, artinya mengosongkan diri dalam perjumpaan antarpribadi (bdk. Flp. 2:7).

Dengan memahami dan mengaktualisasikan hal ini, kelompok berharap bahwa pluralitas iman tidak lagi menjadi suatu alasan untuk berkonflik, tetapi suatu fenomena yang dapat semakin memperkaya hidup iman setiap orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2022). *Relasi Sosial dalam Al-Quran*. QiST, 1(1), 30-47.
- Armstrong, K. (2015). *Sejarah Tuban: Kisah 4000 Tabun Pencarian Tuban dalam Agama-Agama Manusia*. Diterjemahkan dari *A History of God: The 4000 Year Quest of Judaism, Christianity, and Islam* oleh Zaimul Am. Bandung: Mizan.
- Brown, M.E. (1997). "Causes and Implications of Ethnic Conflict", dalam Guibernau dan John Rex (ed), *The Ethnicity Reader Nationalism, Multiculturalism and Migration*. Great Britain: Polity Press.
- Cahaya, Agil Iqbal. (2015). "Rohingnya Korban Minoritas yang Terusir dari Negaranya." Diakses <http://news.okezone.com/read/2015/05/25/18/1154625/sekilas-sejarah-tentang-imigran>.
- Callahan, M.P. (2003). "Language Policy in Modern Burma" dalam Michael E Brown (ed), *Fighting Words*. Cambridge: The MIT Press.
- Featherstone, Mike. (1998). "In Pursuit of the Postmodern: An Introduction," dalam *Theory, Culture and Society*. London: Sage.
- Harvey P. (1990). *An Introduction to Buddhism: Teachings, History, and Practices*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Jamrah, S. (2015). "Toleransi Antar-umat Beragama: Perspektif Islam." *Jurnal Ushuluddin* Vol 23 No. 2 Juli-Desember.
- Jason Szep. (2016) diakses dari <http://www.reuters.com/article/us-myanmar-violence-specialreport-idUSBRE9370AP20130408>, (04 Desember 2016).
- Jerryson, M. (2010). *Buddhist Warfare*. New York: Oxford.
- Kironska, K. (2016). "The Rohingya Oxymoron: Stateless people Leaving Their Home, Country," dalam Samuel C. Y Ku & Kristina Kironska (ed), *Migration in East and Southeast Asia*. New Jersey: World Scientific.
- Knitter, P. (2014). *Pengantar Teologi Agama-Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mangunwijaya, Y., B. (1999). *Gereja Diaspora*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moleong, L., J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muridyatmoko, Janu. (2007). *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Pannavaro, B. (1983). *Agama Buddha (Buddha Dharma) Hanya Satu*. Yayasan Mendut, Wesak 2527.
- Pederson, Rena. (2016). *The Burma Spring Aung San Suu Kyi dan Perjuangan Demi Jiwa Bangsa*. Jakarta: Kaki Langit Kencana.
- Qara'ati, M. (1991). *Alquran Menjawab Dilema Keadilan*. Jakarta: Firdaus.
- Raharjo, Sandy Nur Ikfal. (2015). "Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine Myanmar Tahun 2012-2013." *Jurnal Kajian Wilayah*, Volume VI, No. I, 2015.
- Salim, T., and Agnes Anya. (2016). "No ASEAN Meeting to Discuss Rohingya." *The Jakarta Post*, 26 November.
- Sugiyono, Lestari Puji. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi: Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional*. Bandung: Alfabeta.
- Walto, M., J. (2012). *Politics in the Moral Universe: Burmese Buddhist Political Thought*. Washington: University of Washington.
- Wijaya, Tjahyono. (2007). *Bodhisattva Sangharama*. Surabaya: Buddhist Education Center.
- Windhu, I., Marsana. (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.